

HUBUNGAN PARTISIPASI, UMPAN BALIK DAN TUJUAN ANGGARAN DENGAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH

AKURASI

1

Inne Marita, Swarmilah Hariani*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

Paper type
Accounting, Research
paper

Abstract

This study aims to examine the influence of Characteristics of Budget Objectives on the Performance of Local Government Apparatus. The object of this research was conducted at 15 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) part of planning or budget and finance of DKI Jakarta Province. This study was conducted on 76 respondents by using primary data through questionnaires distributed directly to the respondents. The method of analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The result of this study indicate that budgetary participation, budgetary feedback and budget objective difficulties have no effect on the performance of the local government officials. While the clarity variable of budget objectives and budget evaluation variables affect the performance of local government apparatus. The simultaneous test results revealed that the variables of budgetary participation, clarity of budget objectives, budget evaluation, budget feedback and the difficulties of budget objectives together affect the performance of local government apparatus.

Received: 12 Feb 2020
Revised: 07 Apr 2020
Accepted: 25 Apr 2020
Online: 30 Apr 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Objek penelitian ini dilakukan pada 15 SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) bagian perencanaan atau anggaran dan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap 76 responden dengan menggunakan data primer melalui kuesioner yang disebarakan langsung kepada para responden. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwan partisipasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemrintah daerah. Sedangkan variabel kejelasan tujuan anggaran dan variabel evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil uji simultan mengungkapkan bahwa variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran serta kesulitan tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Keywords: Budgetary
Goal Characteristics,
Performance



Akurasi: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 2, No.1, April 2020,
pp. 1-8
eISSN: 2685-2888

✉ Email korespondensi: swarmilah@mercubuana.ac.id

Pedoman Sitasi: Inne Marita & Swarmilah Hariani (2020). PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i2.145>

PENDAHULUAN

Dampak globalisasi dan meningkatnya teknologi telah menyebabkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai segala hal, termasuk layanan pemerintahan. Kondisi ini kemudian menyebabkan tingginya daya kritis masyarakat akan kinerja layanan dan tata kelola ke arah yang lebih baik (*Good Governance*). Penciptaan *good governance* dapat berjalan dengan baik dan lancar jika didukung oleh seluruh komponen aparatur pemerintah yang memiliki kinerja yang berkualitas. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun non bisnis. Untuk mencapai kinerja organisasi yang baik, diperlukan kemampuan dan bakat yang tinggi oleh setiap individu yang terlibat didalamnya, serta usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Unit layanan pemerintahan dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik dalam arti kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan di lapangan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau para stakeholders. Dalam konteks ini, melalui instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan layanan publik yang akuntabel dan memiliki kinerja yang baik, khususnya di instansi pemerintahan.

Kinerja aparat pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari anggaran, Hal ini dikarenakan anggaran yang telah disusun sebelumnya merupakan perencanaan dan sebagai evaluasi kinerja akhir, atau dapat dikatakan bahwa anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja (kesesuaian antara perencanaan dan realisasi) di tingkat manajerial dan unit organisasi. Pentingnya peran anggaran tersebut menjadikan anggaran dapat dinyatakan sebagai faktor kunci, dan kinerja akan dapat dicapai jika anggaran yang disusun melibatkan partisipasi sebagai bagian dari komitmen pencapaian kinerja di masa depan (dalam Apriani, Rasuli, Taufik, 2016).

Secara spesifik Kenis (1979, dalam Apriani, Rasuli, Taufik, 2016) berpendapat bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan lima komponen Karakteristik Tujuan Anggaran (*Budgetary Goal Characteristic / BGC*). Lima komponen ini terdiri dari partisipasi penganggaran (*budgeting participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgeting feedback*), evaluasi anggaran (*budgeting evaluation*), dan kesulitan tujuan anggaran (*budgeting goal difficulty*). Penerapan lima komponen ini diharapkan dapat berimplikasi pada kinerja.

Studi-studi sebelumnya mengenai karakteristik anggaran telah memberikan kesimpulan yang berbeda mengenai keterkaitan lima komponen karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja. Misalnya Apriani, Rasuli & Taufik (2016) menemukan bahwa partisipasi, kejelasan tujuan, dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan umpan balik anggaran tidak berpengaruh signifikan. Studi lainnya yang dilakukan oleh Lestari (2018) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan umpan balik anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

Sebelumnya, Suryaningsih, (2012) menyimpulkan bahwa paartisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik tujuan anggaran serta kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah kota Yogyakarta. Sedangkan Mongeri (2013) hanya berhasil membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah kota Padang. Studi yang lebih baru dilakukan oleh Tariyah, Wiratno, dan Amilin (2019) menemukan bahwa dari lima komponen tersebut hanya kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa model hubungan karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja masih menarik untuk dipelajari,

khususnya dalam studi ini yang mengaitkan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintahan di Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil studi dapat memberikan informasi terbaru mengenai hubungan karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah sebagai acuan pengambilan keputusan di level organisasi, dan memperkaya hasil studi di bidang ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan studi berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Konsep *Agency Theory* menurut Antony dan Govindarajan dalam Siagian (2011 : 10) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Inti dari teori ini adalah kontrak kerja yang didesain dengan tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara principal dengan agent (Supanto, 2010). Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agent/pemerintah) dan publik (diwakili principal/dewan). Principal harus memonitor kerja agent, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil – wakilnya (Irwan, 2011).

Anggaran

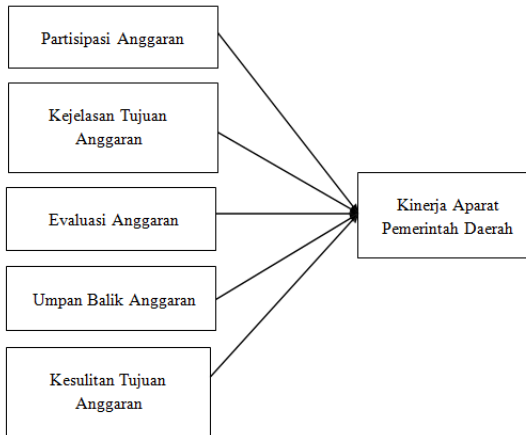
National Committee on Governmental Accounting yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) memberikan penjelasan bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Anggaran juga dapat disebut sebagai sebuah rencana keuangan, dan biasanya mencakup periode satu tahun, dapat bertindak sebagai alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi (Anthony & Govindarajan, 2011). Lebih lanjut disebutkan oleh Anthony dan Govindarajan (2011), penyusunan anggaran memiliki tujuan untuk (1) Memperbaiki rencana strategis; 2) Mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi; 3) Menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan dan memberikan umpan balik pada manajer atas kinerja mereka; (4) Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya.

Karakteristik Tujuan Anggaran dan Kinerja

Karakteristik anggaran merupakan faktor utama yang melekat pada sistem anggaran agar anggaran dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran. Salah satu tujuan yang terkandung dalam karakteristik anggaran merupakan upaya untuk meningkatkan keberadaan anggaran menjadi lebih akurat, sehingga pengendalian yang akan dilakukan dapat lebih terkendali. Kenis (1979) dalam Apriani dkk (2016) mengemukakan lima karakteristik tujuan anggaran (*Budgetary Goal Characteristics*) yaitu: Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran dan Kesulitan Tujuan Anggaran.

Studi-studi sebelumnya mengenai karakteristik anggaran mengaitkannya dengan kinerja. Apriani, Rasuli & Taufik (2016) dalam studinya menemukan bahwa partisipasi, kejelasan tujuan, dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Studi lainnya yang dilakukan oleh Lestari (2018) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sebelumnya, Suryaningsih, (2012) menyimpulkan bahwa

partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik tujuan anggaran serta kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah. Mongeri (2013) hanya berhasil membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah kota Padang. Studi yang lebih baru dilakukan oleh Tariyah, Wiratno, dan Amilin (2019) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial.



Sumber: Kenis (1979)

Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian desain kausal, merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Penelitian kausalitas dianggap sebagai pemahaman fenomena bersyarat dalam bentuk, "Jika X, maka Y". Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen) serta dampak perubahan tertentu terhadap norma-norma dan asumsi yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta yaitu perangkat kerja daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) DKI Jakarta. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat penelitian karena merupakan salah satu Pemerintah Provinsi di Indonesia yang banyak terdapat aktivitas perekonomian. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria pemilihan ialah pejabat struktural pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran dalam proses penyusunan anggaran.

Pengukuran variabel

Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penganggaran mengadaptasi model pengukuran yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) yang terdiri dari 9 indikator, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Model ini telah banyak diadopsi oleh penelitian sebelumnya seperti Istiyani (2009); Apriani, Rasuli & Taufik (2016).

Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik, dan kesulitan

tujuan seluruhnya diadaptasi dari Milani (1975); Apriani, Rasuli & Taufik (2016). Kejelasan anggaran diukur dengan enam indikator (contohnya keterlibatan dalam penyusunan anggaran). Kejelasan tujuan anggaran (X2) diukur dengan empat indikator (contohnya pegawai mengetahui dengan jelas dan tepat tujuan anggaran). Evaluasi Anggaran (X3) diukur dengan lima indikator (contohnya adanya pemberitahuan tentang penyimpangan anggaran); Umpan Balik Anggaran (X4) diukur dengan empat indikator (contohnya jumlah perolehan umpan balik mengenai pencapaian tujuan anggaran); dan terakhir Kesulitan Tujuan Anggaran (X5) diukur dengan lima indikator (contohnya adanya penjelasan kepada atasan mengenai item-item realisasi).

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

Hasil analisis deskriptif seperti yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran (X1) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 15 dengan nilai tertinggi (maximum) sebesar 25, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 20,41 dan standar penyimpangan data (Std Deviation) sebesar 2,161. Pada variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maximum sebesar 20, nilai mean sebesar 17,70 dan nilai Std Deviation sebesar 1,558.

Tabel 1. Deskripsi data

Variabel	N	Mean	Std.dev
X1	76	20.41	2.161
X2	76	17.70	1.558
X3	76	16.75	1.524
X4	76	12.47	1.587
X5	76	12.71	3.032
Y	76	25.30	2.167

Sumber: data lapangan, diolah

Untuk variabel evaluasi anggaran (X3) sebesar 15 merupakan nilai minimum, 20 untuk nilai maximum, sebesar 16,75 untuk nilai mean, dan sebesar 1,524 untuk nilai Std Deviation. Nilai minimum yang terdapat pada variabel umpan balik anggaran (X4) adalah sebesar 10, sedangkan nilai maximum sebesar 15, nilai mean sebesar 12,47 dan nilai Std Deviation sebesar 1,587. Untuk variabel bebas yang terakhir ialah kesulitan tujuan anggaran (X5) memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maximum sebesar 20, nilai mean sebesar 12,71 dan nilai Std Deviation sebesar 3,032. Variabel terikat yaitu kinerja aparat pemerintah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 22, sedangkan nilai maximum sebesar 30, nilai mean sebesar 25,30 dan sebesar 2,167 untuk nilai *Std Deviation*.

Analisis regresi

Pada model regresi berganda, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil regresi sederhana dalam bentuk tabel 2 berikut ini

Koefisien determinasi pada besarnya Adjusted R Square adalah 0,538 atau 53,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel dependen (kinerja) mampu dijelaskan oleh variabel independen (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran) sebesar 53,8% dan selebihnya sebesar 46,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Uji kecocokan model dengan uji F

menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18.838 (sig 0.00) mengindikasikan bahwa model ini layak untuk diinterpretasi lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil analisis regresi

Variabel	koefisien	t-value	sig
X1	0.104	1.218	0.227
X2	0.373	3.083	0.003
X3	0.746	5.847	0.000
X4	0.134	1.035	0.304
X5	-0.016	-0.248	0.805
Adj. R square	0.538		
F-statistik	18.838		

Sumber: data lapangan, diolah

Koefisien partisipasi anggaran (X1) sebesar 0,104 menghasilkan tanda positif pada partisipasi anggaran, hal tersebut menunjukkan apabila partisipasi anggaran meningkat sebesar 1, maka variabel dependen (kinerja aparat pemerintah daerah) akan naik sebesar 10,4%. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,227. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai signifikan $0,227 > \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja (H1 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Artinya, kenaikan atau penurunan partisipasi anggaran tidak akan berdampak signifikan kepada kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil ini berbeda dari temuan Apriani, Rasuli & Taufik (2016); Lestari (2018); Suryaningsih, (2012) yang menemukan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja, namun studi ini sejalan dengan Tariyah, Wiratno, dan Amilin (2019) yang tidak berhasil menemukan efek tersebut.

Koefisien X2 sebesar 0,373 menghasilkan tanda positif pada kejelasan tujuan anggaran, hal tersebut menunjukkan apabila kejelasan tujuan anggaran meningkat sebesar 1, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan naik sebesar 37,3%. Variabel kejelasan tujuan anggaran (X₂) menunjukkan hasil dari probabilitas signifikan sebesar 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai signifikan $0,003 < \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja (H2 didukung). Studi ini mendukung temuan Apriani, Rasuli & Taufik (2016); Lestari (2018) yang menemukan pengaruh signifikan kejelasan tujuan anggaran dengan kinerja. Artinya semua tujuan anggaran yang telah dibuat akan berdampak pada kenaikan atau penurunan kinerja. Semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparat pemerintah daerah dan sebaliknya.

Koefisien X3 sebesar 0,746 menghasilkan tanda positif pada evaluasi anggaran, hal tersebut menunjukkan apabila evaluasi anggaran meningkat sebesar 1, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan naik sebesar 74,6%. Variabel evaluasi anggaran (X₃) menunjukkan hasil dari probabilitas signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja (H3 didukung). Studi ini mendukung temuan Apriani, Rasuli & Taufik (2016); Lestari (2018) yang menemukan pengaruh signifikan evaluasi anggaran dengan kinerja

Apriani, Rasuli & Taufik (2016) dalam studinya menemukan bahwa partisipasi, kejelasan tujuan, dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Studi lainnya yang dilakukan oleh Lestari (2018) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sebelumnya, Suryaningsih, (2012) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik tujuan anggaran serta kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah. Mongeri (2013) hanya berhasil membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja

Pemerintah Daerah kota Padang. Studi yang lebih baru dilakukan oleh Tariyah, Wiratno, dan Amilin (2019) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Koefisien X_4 sebesar 0,134 menghasilkan tanda positif pada umpan balik anggaran, hal tersebut menunjukkan apabila umpan balik anggaran meningkat sebesar 1, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan naik sebesar 13,4%. Variabel umpan balik anggaran (X_4) menunjukkan hasil dari probabilitas signifikan sebesar 0,304. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai signifikan $0,304 > \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja (H_4 ditolak). Studi ini mendukung temuan Apriani, Rasuli & Taufik (2016) yang tidak menemukan efek umpan balik terhadap kinerja

Koefisien X_5 sebesar -0,016 menghasilkan tanda negatif pada kesulitan tujuan anggaran, hal tersebut menunjukkan apabila kesulitan tujuan anggaran meningkat sebesar 1, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan turun sebesar 1,6%. Variabel kesulitan tujuan anggaran (X_5) menunjukkan hasil dari probabilitas signifikan sebesar 0,805. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai signifikan $0,805 > \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja (H_5 ditolak). Studi ini berbeda dengan Suryaningsih, (2012); namun mendukung temuan Apriani, Rasuli & Taufik (2016) yang tidak berhasil menemukan efek kesulitan penyusunan pada kinerja. Artinya, tingginya kesulitan tujuan anggaran akan memberikan pengaruh kinerja yang semakin rendah dan sebaliknya nilai kesulitan tujuan anggaran yang rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Hasil analisis menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, hanya kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah sementara partisipasi anggaran dan umpan balik anggaran, tidak mempengaruhi kinerja. Untuk itu disarankan pada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta agar dapat lebih memperhatikan kedua hal tersebut yang akan membantu meningkatkan kinerja aparatur daerah. Selain itu, pemerintah harus dapat meminimalisir kesulitan tujuan anggaran untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah. Karena kesulitan tujuan anggaran yang rendah akan memberikan peningkatan terhadap kinerja aparatur daerah dan sebaliknya.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini yang cukup mengganggu adalah relative kecilnya ukuran sampel dan studi yang hanya dilakukan di salah satu wilayah, yaitu DKI Jakarta. Penelitian berikutnya perlu mengembangkan sampel yang lebih besar dan mengambil beberapa wilayah Provinsi untuk memperoleh gambaran hasil yang lebih komprehensif sehingga memiliki generalisasi yang lebih kuat.

REFERENSI

Apriani, A., Rasuli, M., & Taufik, T. (2016). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 161-175.

- Astuti, R. P. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kecukupan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada SMK Swasta di Kabupaten Tangerang). Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana, Jakarta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip
- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Temanggung). Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Julio, Y. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana, Jakarta.
- Kenis, I., (1979), Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*.
- Laoli, Vi. (2012). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Sikap Aparat Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Lestari, A. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta).
- Mongeri, M (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
- Nurhayati, N (2012). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Republik Indonesia. 2004. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang – undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Saraswati, I. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset/DPPKA Kota Depok. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana, Jakarta.
- Taryah, T., Wiratno, A., & Amilin, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta dan Depok). *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 6(01).

PROFIL PENULIS

Inne Marita dan Swarmilah Hariani adalah dosen dan mahasiswa di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta.